

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA

3.1 Monografi Kabupaten Dharmasraya

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Pada kawasan ini dahulunya pernah berdiri sebuah Kerajaan Melayu dengan nama ibu kotanya Pulau Punjung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2003, dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Nama kabupaten ini diambil dari manuskrip yang terdapat pada prasasti Padang Roco, di mana pada prasasti itu disebutkan Dharmasraya sebagai ibukota dari kerajaan Melayu waktu itu. Kerajaan ini muncul setelah kejatuhan kerajaan Sriwijaya pada abad 13-14, di mana daerah kekuasaan kerajaan ini merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Sriwijaya sebelumnya, yaitu mulai dari Semenanjung Malaya hingga Sumatera. Hal ini dapat dibuktikan dari Prasasti Grahi di Chaiya, selatan Thailand serta catatan dalam naskah Cina yang berjudul Zhufan Zhi karya Zhao Rugua tahun 1225.

Kemudian kerajaan ini menjalin hubungan dengan Kerajaan Singasari, sebagaimana yang terpahat pada Prasasti Padang Roco. Selain itu nama Dharmasraya juga disebutkan dalam catatan sejarah kerajaan Majapahit, Nagarakertagama sebagai salah satu daerah vasal. Kabupaten Dharmasraya ini merupakan salah satu dari 3 kabupaten baru hasil pemekaran kabupaten Sawahlunto/Sijunjung sebelumnya, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, kabupaten Solok Selatan dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatera Barat, dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004.

Kabupaten Dharmasraya berkembang sebagai salah satu penghasil kelapa sawit atau buah pasir menurut istilah setempat. Di samping itu, kabupaten ini juga merupakan produsen berbagai jenis tanaman keras lainnya, seperti kulit

manis, karet, kelapa, gambir, kopi, cokelat, cengkih, dan pinang. Lahan perkebunan di sana lebih didominasi karet dan sawit. Penghasil kelapa sawit paling banyak di kabupaten ini adalah Kecamatan Sungai Rumbai.

Selain itu terdapat potensi tambang yang hingga detik ini belum tergarap, yakni batu bara, batu kapur, pasir kuarsa, emas, lempung kuarsit, dan sebagainya. Kabupaten ini masih baru dan masih dalam tahap mengembangkan diri dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya. Ditunjang dengan posisi strategisnya di Sumatera (dilintasi Jalur Lintas Tengah Sumatera sepanjang 100 km), maka Dharmasraya cepat menjadi kawasan yang maju dan tumbuh sebagai wilayah perdagangan dan jasa.

a. Geografi

Secara geografi Kabupaten Dharmasraya berada di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Dharmasraya berada di antara $00^{\circ}48'25,4''$ – $01^{\circ}41'40,3''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ}08'32,5''$ – $101^{\circ}53'30,3''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No 4 Tahun 2009 yaitu $2.961,13 \text{ Km}^2$ (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil digitasi citra spot 5 pada RTRW Kabupaten Dharmasraya memiliki luas $3.025,99 \text{ km}^2$ (302.599 Ha).

Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, jumlah kecamatan di Kabupaten Dharmasraya dimekarkan dari 4 kecamatan menjadi 11 Kecamatan. Dengan dihapusnya sistem pemerintahan desa, pemerintah yang berada setingkat dibawah kecamatan adalah nagari, dan selanjutnya dibawah nagari adalah jorong. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Nagari terdapat sebanyak 48 nagari. Pada Tahun 2009 dikeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Penataan Nagari. Dalam Perda tersebut terdapat beberapa nagari yang dimekarkan, dari 48 nagari menjadi 52 nagari (Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, 2012).

Tabel 3. 1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari		Jorong		
			2005- 2008	2009- 2024	2005- 2008	2009- 2011	2011- 2024
1	Sungai Rumbai	5106	6	4	26	24	43
2	Asam Jujuhan*	48541	-	5	-	22	22
3	Koto Besar*	56057	-	7	-	32	43
4	Koto Baru	22120	7	4	38	26	73
5	Koto Salak**	12145	-	5	-	27	44
6	Padang Laweh**	6062	-	4	-	17	17
7	Tiumang**	13443	-	4	-	17	30
8	Sitiung	12457	3	4	20	22	52
9	Timpeh***	32301	-	5	-	21	40
10	Pulau Punjung	44316	5	6	25	31	62
11	IX Koto****	50050	-	4	-	21	35
Kab. Dharmasraya		30259 9	21	52	109	260	461

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 & Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020-2024

Ket: *: Pemekaran dari Kecamatan Sungai Rumbai

** : Pemekaran dari Kecamatan Koto Baru

***: Pemekaran dari Kecamatan Sitiung

****: Pemekaran dari Kecamatan Pulau Punjung

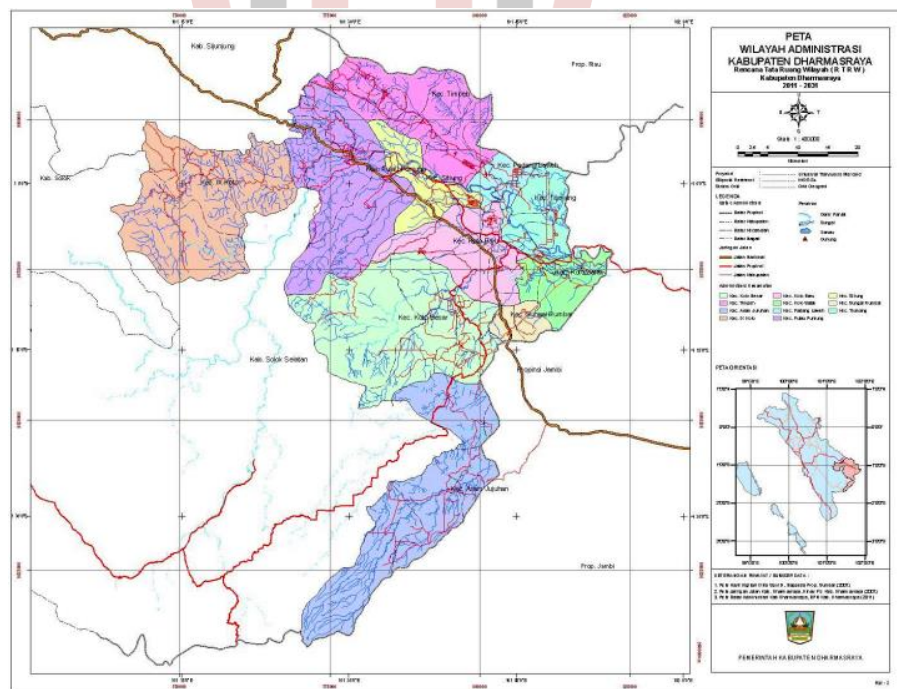
b. Batas Wilayah

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung, serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi,
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi,
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada **Gambar 3.1**

Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

c. Topografi dan kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada ketinggian 100-1500 meter diatas permukaan laut (dpl). Ketinggian dari permukaan laut mulai dari 100 meter dpl pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, hingga 1.500 meter dpl pada bagian kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat. Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Peta Digitasi Citra Spot 5 Provinsi Sumbar (2007), diperoleh data kelerengan lahan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	23155	7,65
Agak Landai	3-8	68786	22,73
Landai	8-15	72339	23,91
Agak Curam	15-25	74730	24,70
Curam	25-40	29023	9,59
Sangat Curam	40-60	34567	11,42
Jumlah	Luas	302599	100,00

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

d. Iklim

Iklim di wilayah Kabupaten Dharmasraya adalah iklim tropis dengan tipe ekuatorial (Af). Suhu udara di kabupaten ini berkisar antara 21 °C hingga 33 °C dengan rata-rata hari hujan 14.35 hari per bulan dan rata-rata curah hujan 265,36 mm per bulan. Tingkat kelembapan nisbi di wilayah Dharmasraya pun cukup tinggi ±83%. Curah hujan tahunan di wilayah Dharmasraya cenderung tinggi berkisar antara 2600–3200 mm per tahun dengan jumlah hari hujan lebih dari 160 hari hujan per tahun.

e. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Saat ini Sungai Batanghari masih menjadi tempat berlangsungnya kegiatan pasar hasil bumi dari wilayah Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan, yang selanjutnya dijual oleh para pedagang di Kota Jambi dan Kuala Tungkal.

f. Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Dharmasraya tercatat 240,16 ribu jiwa data per 2024. Angka ini bertambah dibanding 2023 dan lebih tinggi dibanding Desember 2021. Dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, rata-rata pertumbuhan tahunan (CAGR) wilayah ini tercatat lebih rendah. Adapun pertumbuhan lima tahun terakhir, tercatat diangka -0,12%. Menurut nominalnya dibandingkan dengan wilayah lain se-provinsi Sumatera Barat, kabupaten/kota ini berada di urutan 11, sementara menurut pulau, kabupaten/kota ini berada di urutan 91.

Berikut ini jumlah penduduk menurut umur di Kabupaten Dharmasraya pada Juni 2024 bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) (Darmawan, 2025):

Tabel 3. 3 Presentase Penduduk di Kabupaten Dharmasraya Menurut Kategori Kelompok (Umur) Tahun 2024

Kelompok (Umur)	Presentase	Jumlah Jiwa
Anak-anak (0-14)	24,65	59,19
Produktif (15-59)	65,83	158,09
Usia Lanjut (+60)	9,53	22,88

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/7d246a1e6c9d57d/data-bps-2024-24-65-penduduk-kabupaten-dharmasraya-masih-anak-anak>

g. Pemerintahan

1. Daftar bupati

Berikut ini rangkuman daftar nama Bupati Dharmasraya mulai periode awal berdirinya Kabupaten Dharmasraya hingga sekarang.

Tabel 3. 4 Daftar Bupati Kabupaten Dharmasraya

No	Nama	Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Keterangan
1	Ahmad Munawar	2004	2004	Penjabat
2	Asrul Syukur	2004	2005	Penjabat
3	Marlon Martua	2005	2010	
4	Adi Gunawan	2010	2015	
5	Syarfrizal Ucock	2015	2016	Penjabat
6	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	2016	2021	
7	Adisman	2021	2021	Pelaksana Harian
8	Sutan Riska Tuanku Kerajaan	2021	2025	2 Periode
9	Annisa Suci Ramadhani	2025	Sekarang	

Sumber: <https://www.idezia.com/2024/09/DaftarBupatiDharmasraya.html>

Dari rangkuman di atas dapat dilihat bahwasanya bupati (ataupun penjabat bupati) Dharmasraya memiliki sejarah baru dengan adanya bupati perempuan pertama di Kabupaten Dharmasraya dan juga sekaligus bupati perempuan pertama di Sumatera Barat.

2. Dewan Perwakilan Rakyat

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar dalam tiga periode terakhir.

Tabel 3. 5 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Dharmasraya

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode		
	2014-2019	2019-2024	2024-2029
PKB	2	1	4
Gerindra	2	3	4
PDI-P	4	7	6
Golkar	5	5	5

NasDem	3	3	1
PKS	1	2	1
Hanura	3	1	1
PAN	2	4	5
Demokrat	2	2	2
PPP	1	0	1
Berkarya	-	2	-
Jumlah Anggota	25	30	30
Jumlah Partai	10	10	10

Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Dharmasraya#Periode_2019%E2%80%932024

3. Kecamatan

Kabupaten Dharmasraya memiliki 11 kecamatan dan 52 nagari. Berikut adalah daftar kecamatan dan nagari di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, Indonesia.

Tabel 3. 6 Daftar Kecamatan dan Nagari di Kabupaten Dharmasraya

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Nagari
1	Pulau Punjung	Sungai Dareh	IV Koto Pulau Punjung
			Sungai Kambut
			Gunung Selasih
			Sungai Dareh
			Tebing Tinggi
			Sikabau
2	IX Koto	Silago	Silago
			Lubuak Karak
			Koto IV Dibawuah
			Banai
3	Sitiung	Sitiung	Siguntur
			Sitiung
			Gunung Medan
			Sungai Duo
4	Timpeh	Timpeh	Timpeh
			Taratak Tinggi
			Tabek
			Penyubaringan
			Ranah Palabi
5	Koto Salak	Koto Salak	Koto salak

			Padukuan
			Pulau Mainan
			Simalidu
			Ampalu
6	Tiumang	Tiumang	Tiumang
			Koto Baringin
			Sipangku
			Sungai Langkok
7	Laweh	Laweh	Laweh
			Batu Rijal
			Sopan Jaya
			Muaro Sopan
8	Koto Besar	Koto Besar	Koto Besar
			Abai siat
			Bonjol
			Koto Gadang
			Koto Laweh
			Koto Tinggi
			Koto Ranah
9	Asam Jujuhan	Sungai Limau	Sungai Limau
			Sinamar
			Lubuk besar
			Tanjung Alam
			Alahan Nan Tigo
10	Koto Baru	Koto Baru	Koto Baru
			Ampang Kuranji
			Sialang Gaung
			Koto Padang
11	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai
			Sungai Rumbai Timur
			Kurnia Koto Salak
			Kurnia Selatan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

h. Infrastruktur

Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031, sebagai berikut;

1. Meningkatkan pelayanan sistem transportasi melalui:

- a) Mengembangkan akses transportasi jalan dan rel menuju sentra pengembangan ekonomi koridor timur Pulau Sumatera.
 - b) Mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten.
 - c) Mengembangkan transportasi air Sungai Batanghari terutama untuk mendukung kegiatan wisata.
2. Meningkatkan pelayanan prasarana kawasan permukiman melalui:
- a) Menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan yang rawan air bersih.
 - b) Menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan.
 - c) Menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman.
 - d) Menyediakan instalasi pengolahan limbah melayani kawasan perkotaan.
 - e) Penyediaan jaringan telekomunikasi pada seluruh wilayah Kabupaten Dharmasraya.
3. Tersedianya pusat pelayanan pemerintahan yang representatif melalui pembangunan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan pemerintahan secara efektif dan efisien.
- i. Pendidikan

Kebutuhan sarana pendidikan di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2031. Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2031 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007.

Tabel 3. 7 Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Tingkat SLTP/Sederajat Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2031

No	Kecamatan	SLTP/Sederajat			
		SLTP	MTs	Jumlah	Jumlah Kebutuhan Tambahan Sampai 2031
1	Sungai Rumbai	2	1	3	1
2	Koto Besar	3	1	4	2
3	Asam Jujuhan	1		1	2
4	Koto Baru	4	4	8	1
5	Koto Salak	2		2	2
6	Tiumang	1	1	2	1
7	Padang Laweh	1		1	2
8	Sitiung	3	4	7	1
9	Timpeh	4	1	5	2
10	Pulau Punjung	7	3	10	2
11	IX Koto	3		3	4
Jumlah		31	15	46	20

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Tabel 3. 8 Perkiraan Jumlah Sarana Pendidikan Tingkat SLTA/Sederajat Pelayanan Skala Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Dharmasraya sampai tahun 2031

No	Kecamatan	SLTA/Sederajat			
		SLTA	MA	Jumlah	Jumlah Kebutuhan Tambahan Sampai 2031
1	Sungai Rumbai	1		1	1
2	Koto Besar	1		1	2
3	Asam Jujuhan				2
4	Koto Baru		3	3	1
5	Koto Salak	2		2	1
6	Tiumang				2
7	Padang Laweh				2
8	Sitiung	1	4	5	1
9	Timpeh	1	1	2	2
10	Pulau Punjung	2	2	4	1
11	IX Koto				3
Jumlah		8	10	18	18

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Sarana pendidikan dasar (SD) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) direncanakan untuk dapat menjangkau seluruh penduduk Kabupaten Dharmasraya. Kendala yang dihadapi adalah tersebarnya penduduk pada area yang luas sehingga jarak menjadi kendala utama pelayanan. Untuk itu minimal pada setiap kota kecamatan telah tersedia sarana pendidikan dari SD sampai SLTA. Akses dari kawasan permukiman menuju pusat pelayanan kecamatan tersebut perlu untuk ditingkatkan.

Program prioritas pengembangan sarana pendidikan yaitu pengembangan sarana pendidikan SLTA pada kecamatan yang belum memiliki sarana tersebut, yaitu di Kec. Asam Jujuhan, Kec. Koto Salak, Kec. Padang Laweh, Kec. Tiumang, dan kawasan utara Kec. Timpeh. Kawasan utara Kecamatan Timpeh perlu disediakan sarana SLTA karena jauhnya akses menuju sarana SLTA yang terdapat di Tabek Payubarangan.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, menunjukkan data pendidikan tahun 2024/2025 yang berada di Kabupaten Dharmasraya, sebagai berikut (Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya, 2024):

Tabel 3. 9 Data Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024/2025

No	Tingkat	Jumlah Sekolah	Jumlah Siswa
1	TK (Negeri/Swasta)	135	4.588
2	SD (Negeri/Swasta)	167	26.714
3	MI (Negeri/Swasta)	9	1.114
4	SMP (Negeri/Swasta)	39	9.311
5	MTs (Negeri/Swasta)	18	2.867
6	SMA (Negeri/Swasta)	17	5.930
7	SMK (Negeri/Swasta)	9	3.306
8	MA (Negeri/Swasta)	14	813

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan dalam bidang pendidikan berupa penambahan sekolah setiap tahunnya.

j. Ekonomi

Posisi Kabupaten Dharmasraya sangat strategis yaitu berbatasan langsung dengan Provinsi yang menjadi pusat pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia untuk Pulau Sumatera (Provinsi Riau dan Provinsi Jambi). Koridor Ekonomi Sumatera menghubungkan 7 (tujuh) simpul yaitu Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang dan Jakarta. Sektor dan fokus dari pengembangan koridor Sumatera yaitu:

1. Minyak Kelapa Sawit/CPO - Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi mature plantation.
2. Karet - Meningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir.
3. Batubara - Meningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api.

Faktor kedekatan jarak menjadi keuntungan lokasional Kabupaten Dharmasraya untuk mengembangkan sektor ekonomi daerah dengan mengkaitkan dengan pengembangan Koridor Ekonomi Timur Pulau Sumatera sebagai sentra perkebunan dan lumbung energi.

Peluang pengembangan komoditi unggulan yang selaras dengan fokus utama pengembangan sektor di Koridor Ekonomi Sumatera. Dalam hal ini agar bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Kabupaten Dharmasraya maka dengan karakteristik komoditi sawit yang oligopoli (banyak dikuasai oleh beberapa perusahaan besar), maka kebijakan pengembangan perkebunan yang lebih berpihak kepada masyarakat akan lebih membawa dampak yang besar bagi kesejahteraan di wilayah Kabupaten Dharmasraya.

k. Pertambangan

Bahan galian yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari batu bara, bitumen padat, emas sekunder, bijih besi, perak, batu gamping, pasir kuarsa, batu gunung, tanah urug, tanah liat, sirtukil, mangan, dan suseki. Sedangkan potensi tambang yang potensial dikembangkan dan sudah mulai dieksplotasi dalam jumlah besar adalah:

1. Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan (PT. TBN, PT. SLN, KUD Sinamar Sakato dan PT CBI) dengan Produksi Tahun 2009: 449.780,25 MT.
2. Batu Bara yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Padang Laweh oleh PT PBA.
3. Batu Bara dalam tahap eksplorasi yaitu di Kecamatan Asam Jujuhan oleh CV. X Dareh, PT BSA dan PT IMR, di Kecamatan Padang Laweh yaitu PT PBM dan PT IMR dan di Kecamatan Timpeh oleh PT DAA.
4. Bijih Besi yang sudah dieksploitasi di Kecamatan Asam Jujuhan oleh PT TSS.
5. Mangan, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Timpeh).
6. Bitumen padat, masih dalam Proses Perijinan (Kec. Pd. Laweh).

Kawasan pertambangan berdasarkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan seluas 19.975 Ha. IUP Pertambangan yang berada dalam kawasan hutan seluas 2.774 Ha dan dalam kawasan perkebunan besar seluas 8.015 Ha. IUP operasi produksi pertambangan seluas 2.388 Ha dan masih berupa IUP eksplorasi pertambangan seluas 17.587 Ha.

1. Industri

Untuk mendukung fungsi sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya berpotensi untuk pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan industri bahan tambang mengingat:

1. Kabupaten Dharmasraya adalah kabupaten penghasil komoditi karet dan sawit serta bahan tambang terutama batu bara dan biji besi dengan kontribusi besar di Provinsi Sumatera Barat.
2. Posisi Kabupaten Dharmasraya yang berada pada kawasan perbatasan tenggara Provinsi Sumatera Barat dan dilalui oleh jalan lintas tengah Sumatera memudahkan akses menuju outlet regional di pelabuhan Teluk Bayur dan outlet regional di pantai timur Sumatera.

Pengembangan kawasan industri dengan luas mencapai 500 Ha dengan alternatif lokasi di Kec. Koto Besar, Kec. Koto Baru, Kec. Koto Salak, Kec. Tiumang, atau Kec. Padang Laweh pada koridor jalan lingkaran utara atau selatan. Jenis industri yang potensial untuk dikembangkan yaitu:

1. Industri pengolahan pertanian karet, sawit,
2. Industri pengolahan bahan tambang seperti batu bara, biji besi dan hasil tambang lainnya yang potensial untuk dieksploitasi.
3. Pengembangan industri pengolahan hortikultura buah-buahan.

3.2 Pemilihan Kepala Daerah

Setiap pembicaraan mengenai pemilihan umum, nampaknya tidak bisa dipisahkan dari suatu konsep yang dinamakan “demokrasi”. Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan sekitar 2400 tahun yang lalu. Pendapat ini dikemukakan oleh Geovani Sartori, ia adalah *Herodotus* yang dianggap sebagai orang pertama yang mengungkapkan di dalam bukunya “*History*” dimana kekuasaan (*demos*) atau orang banyak haruslah berdasarkan isomania atau persamaan hukum. Dari persamaan tersebut, kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat atau *setting* dimana politik berjalan (Sulaeman, 2015: 20).

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan (Pratyahara et al., 2024). Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pengertian Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di atas, dapat diketahui bahwa Pemilukada adalah suatu sistem Pemilihan Kepala Daerah dalam sebuah negara yang berkonsep demokrasi guna mendapatkan seorang tokoh pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat di sebuah daerah. Dimana pelaksanaannya harus melibatkan seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali, termasuk juga Masyarakat Penyandang Disabilitas. Ketentuan ini sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 tentang kesamaan Hak Konstitusional setiap warga negara. Dimana di dalam sebuah Negara Demokrasi sistem Pemilihan Kepala Daerah ini harus diatur dan dilindungi melalui undang-undang yang berlaku demi mencapai tujuan nasional sebuah negara (Anggalana, 2022).

Kepala Daerah yang berperan sebagai kepala wilayah administratif adalah penanggung-jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Di tangan kepala daerahlah suatu daerah akan dinilai berhasil atau gagal, dimana rakyat dan pemerintah pusat (Presiden) berhak mengevaluasinya secara faktual dan menyeluruh. Kepala Daerah akan dinilai rakyat karena saat ini ia dipilih melalui pemilukada. Selain itu, pemilihan kepala daerah ditujukan untuk mendukung otonomi daerah, karena pemimpin yang pilih secara langsung oleh masyarakat akan lebih paham akan kondisi yang ada di daerahnya. Ia juga akan dinilai oleh pemerintah pusat (Presiden) karena kepala daerah membina wilayah dan mengembangkan wilayah yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Sulaeman, 2015: 21).

Dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak berdasarkan pada Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum junto UU No 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang merupakan revisi atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2014. Pilkada serentak merupakan reformasi sistem pilkada yang sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan

berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Pelaksanaan pilkada serentak merupakan usaha untuk mengakhiri ritual politik yang berlangsung sepanjang tahun. Namun, yang lebih penting lagi, pilkada serentak diharapkan menjadi solusi atas ongkos demokrasi berbiaya tinggi dari APBN dan APBD (Pardede, 2018).

Berdasarkan beberapa definisi dari pemilihan kepada daerah diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan proses dimana rakyat pada suatu daerah dapat memilih langsung pemimpin untuk daerah tersebut. Selain itu pemilukada memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin pada suatu daerah secara langsung agar melaksanakan urusan dan kepentingan suatu daerah dengan memperkuat otonomi daerah. Selanjutnya, menurut Maswadi Rauf dalam makalahnya tahun 2005 menyebutkan bahwa setidaknya ada empat alasan mengapa pemilukada langsung perlu digelar, yaitu:

1. Untuk membangun otonomi daerah,
2. Menumbuhkan kepemimpinan lokal,
3. Meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi pemerintah,
4. Proses legitimasi rakyat yang kuat (Simamora, 2011).

Sebagaimana perbandingan untuk pengaturan pelaksana tugas yang ditentukan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dalam Pasal 9 yang mengatur tentang tugas dan wewenang Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota sebagai berikut:

1. Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah:
 - a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ditetapkan bersama DPRD;

- b. Memfasilitasi penyelenggaraan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta untuk menjaga netralitas PNS;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat;
 - d. Menandatangani Perda tentang APBD dan Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
 - e. Melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda Perangkat Daerah setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bahwa Pelaksana Tugas Gubernur, Pelaksana Tugas Bupati, dan Pelaksana Tugas Walikota dapat di pertanggungjawabkan (Kelibay et al., 2022).

Asas-asas yang digunakan dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam pemilu, yakni langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berikut penjelasan asas-asas pemilihan umum yaitu:

1. Asas Langsung memiliki pemaknaan bahwa pemilih wajib memilih secara langsung dan tidak dapat diwakili oleh siapapun dan dimanapun. karena prinsip langsung merupakan prinsip yang paling dasar dalam pemilu;
2. Asas umum, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang bersifat nondergabelright atau tidak dapat dibatsi atau mendapatkan hak yang sama yaitu memilih tanpa memandang ras, agama,suku,dan budaya;
3. Asas bebas, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap warga negara memilih bebas menentukan pilihannya tanpa diintervensi dan dipaksa dalam memilih suatu calon baik itu pemimpin negara maupun perwakilan rakyat;
4. Asas rahasia, yang memiliki pemaknaan bahwa dalam pemilihan setiap orang wajib untuk menjaga kerahasiaan siapa dan kenapa pemilih memilih calon tersebut sehingga tidak dapat membuat suatu dugaan yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar prinsip pemilu,

5. Asas jujur, dalam pemaknaan asas jujur Ini mengandung pemaknaan bahwa semua orang yang terkait didalam pelaksanaan pemilu baik Itu penyelenggara, pemilih, maupun yang dipilih haruslah jujur dari awal proses pemilu sampai akhir pemilu;
6. Asas adil, yang memiliki pemaknaan bahwa setiap orang harus mendapatkan hak yang sama sehingga terimplementasikan falsafah ke lima bangsa Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia (Lubis et al., 2022).

Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu pilkada serentak tahun 2024 dengan paslon tunggal dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Jumlah paslon tunggal pada pilkada serentak tahun 2024 terhitung sebanyak 37 paslon diberbagai daerah. Hal ini bukan merupakan fenomena baru tentang paslon tunggal yang terjadi pada pilkada serentak. Ada lima gelombang dari pelaksanaan pilkada serentak tentang kemunculan paslon tunggal, mulai dari tahun 2015 sampai 2024.

Tabel 3. 10 Paslon Tunggal Dalam Pilkada Serentak 2015-2024

No	Pilkada	Jumlah Paslon Tunggal	Jumlah Daerah Pilkada	Persentase Paslon Tunggal
1	2015	3	269	1,12%
2	2017	9	101	8,91%
3	2018	16	171	9,36%
4	2020	25	270	9,26%
5	2024	37	545	6,79%

Sumber: Dinamika Politik Calon Tunggal Serentak 2024 di Kabupaten Dharmasraya

Di Sumatera Barat paslon tunggal muncul pertama kali pada saat pilkada serentak tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat. Namun pada pilkada serentak tahun 2024 paslon tunggal muncul kembali di Kabupaten Dharmasraya. Pasangan tunggal tersebut adalah Annisa Suci Ramadhani-Leliarni. Paslon tunggal ini menang melawan kotak kosong dengan didukung oleh 9 partai politik, yakni PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, PKB, Demokrat, PKS, PPP,

dan Hanura (Suryaningsih et al., 2025). Namun yang menarik perhatian penulis adalah paslon tunggal tersebut merupakan perempuan pertama di Sumatera Barat yang berhasil menjadi kepala daerah terpilih di Kabupaten Dharmasraya. Perolehan suara pada pilkada Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3. 2 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024



Kabupaten / Kota : DHARMASRAYA
Provinsi : SUMATERA BARAT

MODEL

D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota

Halaman 2-1 Lembar 1

URAIAN			RINCIAN											
NO.	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	KOTO BARU	PULAU PUNJUNG	SUNGAI RUMAH	SITUNG	SEMBILAN KOTO	TIMPEH	KOTO SALAK	TUMANG	PADANG LAWEH	ASAM JUJUHAN	KOTO BESAR	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	DATA PEMILIH	LK	11.952	16.456	8.462	10.793	3.423	6.527	6.761	4.926	2.488	3.212	10.089	85.079
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	PR	12.107	16.131	8.214	10.640	3.373	6.384	6.768	4.914	2.401	2.978	9.924	83.834
		JML	24.059	32.587	16.676	21.433	6.796	12.911	13.529	9.840	4.889	6.190	20.013	168.913
B	PENGGUNA HAK PILIH	LK	5.470	9.286	3.759	5.877	2.109	3.300	3.728	2.911	1.222	1.266	4.740	43.668
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	PR	7.400	10.914	4.625	6.884	2.418	3.972	4.213	3.444	1.397	1.338	6.036	52.711
		JML	12.870	20.200	8.384	12.761	4.527	7.272	7.941	6.355	2.619	2.654	10.796	96.379
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	27	41	16	39	11	12	5	1	3	3	14	172
		PR	31	29	30	18	12	12	4	0	6	1	13	156
		JML	58	70	46	57	23	24	9	1	9	4	27	328
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	7	27	4	11	3	15	4	5	4	5	5	90
		PR	8	26	5	9	2	9	3	4	3	3	4	76
		JML	15	53	9	20	5	24	7	9	7	8	9	166
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	5.504	9.354	3.779	5.927	2.123	3.327	3.737	2.917	1.229	1.274	4.759	43.930
		PR	7.439	10.969	4.660	6.911	2.432	3.993	4.220	3.448	1.406	1.392	6.073	52.943
		JML	12.943	20.323	8.439	12.838	4.555	7.320	7.957	6.365	2.635	2.666	10.832	96.873

URAIAN			RINCIAN											
NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	KOTO BARU	PULAU PUNJUNG	SUNGAI RUMAH	SITUNG	SEMBILAN KOTO	TIMPEH	KOTO SALAK	TUMANG	PADANG LAWEH	ASAM JUJUHAN	KOTO BESAR	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		24.609	33.455	17.113	22.007	6.973	13.251	13.894	10.098	5.018	6.354	20.539	173.381
2	Jumlah surat suara yang digunakan		12.943	20.323	8.439	12.838	4.555	7.320	7.957	6.365	2.635	2.666	10.832	96.873
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)	3	4	4	2	0	3	3	0	2	1	0	22	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpasai, termasuk sisa surat suara cadangan		11.743	13.128	8.670	9.167	2.418	5.928	5.924	3.733	2.381	3.687	9.707	76.486

URAIAN			RINCIAN											
NO.	DATA PEMILIH DISABILITAS	KOTO BARU	PULAU PUNJUNG	SUNGAI RUMAH	SITUNG	SEMBILAN KOTO	TIMPEH	KOTO SALAK	TUMANG	PADANG LAWEH	ASAM JUJUHAN	KOTO BESAR	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
III	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	15	24	8	19	7	20	7	6	1	6	26	139
		PR	16	22	10	20	14	20	9	7	2	8	35	163
		JML	31	46	18	39	21	40	16	13	3	14	61	302

bd1eeb23-a891-490a-ac2d-bc1d88b0aa5-pilkada(100)-2024-12-05-052531

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2. ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H., KELIARNI, S.P., M.Si.			



Kabupaten / Kota : DHARMASRAYA
Provinsi : SUMATERA BARAT

MODEL

D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota

Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN											
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KOTO DARU	PULAU PUNJUNG	SUNGAI RUMAH	SITUNG	SEMBILAN KOTO	TIMPEH	KOTO SALAK	TUMANG	PADANG LAWEH	ASAM JUJULAN	KOTO BESAR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON													
1	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	5.303	1.899	3.598	4.540	248	1.858	3.028	2.333	757	358	4.973	28.895
2	ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H. - LELIARNI, S.Pd., M.Si.	7.336	18.155	4.623	8.029	4.227	5.276	4.726	3.893	1.820	2.228	5.609	65.922

NO.	URAIAN	RINCIAN											
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KOTO BARU	PULAU PUNJUNG	SUNGAI RUMAH	SITUNG	SEMBILAN KOTO	TIMPEH	KOTO SALAK	TUMANG	PADANG LAWEH	ASAM JUJULAN	KOTO BESAR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	12.639	20.054	8.221	12.569	4.475	7.134	7.754	6.226	2.577	2.586	10.582	94.817
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	304	269	218	269	80	186	203	139	58	80	250	2.056
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + B)	12.943	20.323	8.439	12.838	4.555	7.320	7.957	6.365	2.635	2.666	10.832	96.873

1

France 

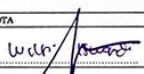
2

Hana Cici 

3



4



5



NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI

1.	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2.	ANNISA SUCI RAMADHANI, S.H. - LELIARNI, S.Pd., M.Si.
			

Sumber: KPU Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan rekapitulasi hasil perolehan suara pada gambar di atas, terdapat jumlah surat suara yang diterima dan termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT terhitung sebanyak 173.381 surat suara dari setiap kecamatan. Surat suara yang digunakan hanya sebanyak 96.873 dan yang tidak digunakan/tidak terpakai sebanyak 76.486. Berarti banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak suaranya pada pilkada serentak di Kabupaten Dharmasraya. Dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Kecamatan Pulau Punjung termasuk kecamatan yang memiliki surat suara terbanyak dengan suara sah sebanyak 20.054 dan Kecamatan Pulau Punjung merupakan pemilih Annisa Suci Ramadhani-Leliarni terbanyak dengan suara 18.155. Namun pada surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, Kecamatan Pulau Punjung juga termasuk kecamatan yang tidak menggunakan hak suara terbanyak.

Kecamatan Pulau Punjung memiliki 6 nagari, yaitu Sungai Dareh, Tebing Tinggi, IV Koto Pulau Punjung, Sungai Kambut, Gunung Selasih, dan Sikabau. Dari 6 nagari tersebut, Nagari IV Koto Pulau Punjung yang memiliki surat suara terbanyak pada Kecamatan Pulau Punjung. Oleh karena itu penulis tertarik memfokuskan meneliti pada Nagari IV Koto Pulau Punjung dengan surat suara terbanyak. Surat suara tersebut dapat dilihat lebih jelas pada **Gambar 3.3** berikut.

Gambar 3. 3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Tambahan 2,5% (Dua Koma Lima Persen) Per Tempat Pemungutan Suara (Tps) Untuk Kebutuhan Surat Suara Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2024

KABUPATEN PROVINSI		DHARMASRAYA SUMATERA BARAT							
NO	NAMA KECAMATAN	NAMA KELURAHAN/DE SA/ NAGARI	NOMOR TPS	PEMILIH			KEBUTUHAN SURAT SUARA PEMBULATAN KEATAS		
				L	P	L+P	2.5%	PEMBU LATAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PULAU PUNJUNG	SUNGAI DAREH	1	264	257	521	13.03	14	535
			2	270	270	540	13.50	14	554
			3	215	209	424	10.60	11	435
			4	278	261	539	13.48	14	553
			5	292	274	566	14.15	15	581
			6	234	245	479	11.98	12	491
			7	258	279	537	13.43	14	551
			8	292	270	562	14.05	15	577
			9	263	263	526	13.15	14	540
			10	164	170	334	8.35	9	343
			11	201	212	413	10.33	11	424
			12	70	53	123	3.08	4	127
			13	220	218	438	10.95	11	449
JUMLAH NAGARI SUNGAI DAREH			13	3,021	2,981	6,002	150.05	158	6,160
		TEBING TINGGI	1	179	176	355	8.88	9	364
			2	195	189	384	9.60	10	394
			3	241	256	497	12.43	13	510
			4	150	148	298	7.45	8	306
			5	266	283	549	13.73	14	563
			6	218	218	436	10.90	11	447
			7	212	181	393	9.83	10	403
JUMLAH NAGARI TEBING TINGGI			7	1,461	1,451	2,912	72.80	75	2,987
		EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	1	287	288	575	14.38	15	590
			2	219	206	425	10.63	11	436
			3	238	235	473	11.83	12	485
			4	253	247	500	12.50	13	513
			5	262	279	541	13.53	14	555
			6	271	238	509	12.73	13	522
			7	213	194	407	10.18	11	418
			8	256	254	510	12.75	13	523
			9	284	278	562	14.05	15	577
			10	254	279	533	13.33	14	547
			11	288	289	577	14.43	15	592
			12	252	233	485	12.13	13	498
			13	254	252	506	12.65	13	519
			14	165	160	325	8.13	9	334
JUMLAH NAGARI EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG			14	3,496	3,432	6,928	173.20	181	7,109

		SUNGAI KAMBU	1	270	254	524	13.10	14	538
			2	269	287	556	13.90	14	570
			3	270	217	487	12.18	13	500
			4	266	283	549	13.73	14	563
			5	177	192	369	9.23	10	379
			6	228	212	440	11.00	11	451
			7	285	268	553	13.83	14	567
			8	246	267	513	12.83	13	526
			9	297	289	586	14.65	15	601
			10	161	141	302	7.55	8	310
			11	108	101	209	5.23	6	215
			12	229	228	457	11.43	12	469
			13	168	165	333	8.33	9	342
			14	201	191	392	9.80	10	402
			15	227	208	435	10.88	11	446
JUMLAH NAGARI SUNGAI KAMBU			15	3,402	3,303	6,705	167.63	174	6,879
	GUNUNG SELASIH	1	156	165	321	8.03	9	330	
		2	274	269	543	13.58	14	557	
		3	237	229	466	11.65	12	478	
		4	288	277	565	14.13	15	580	
		5	61	59	120	3.00	3	123	
		6	141	155	296	7.40	8	304	
		7	253	228	481	12.03	13	494	
		8	196	185	381	9.53	10	391	
JUMLAH NAGARI GUNUNG SELASIH			8	1,606	1,567	3,173	79.33	84	3,257
	SIKABAU	1	197	195	392	9.80	10	402	
		2	182	180	362	9.05	10	372	
		3	209	207	416	10.40	11	427	
		4	191	183	374	9.35	10	384	
		5	298	292	590	14.75	15	605	
		6	237	228	465	11.63	12	477	
		7	192	178	370	9.25	10	380	
		8	222	224	446	11.15	12	458	
		9	293	260	553	13.83	14	567	
		10	205	204	409	10.23	11	420	
		11	275	267	542	13.55	14	556	
		12	261	242	503	12.58	13	516	
		13	56	39	95	2.38	3	98	
		14	282	288	570	14.25	15	585	
		15	208	215	423	10.58	11	434	
		16	162	195	357	8.93	9	366	
JUMLAH NAGARI SIKABAU			16	3,470	3,397	6,867	171.68	180	7,047
JUMLAH TOTAL PULAU PUNJUNG			73	16,496	16,131	32,587	814.68	852	33,439

Sumber: <https://jdih.kpu.go.id/data-kabko/dharmasraya/data%20kepkpud/621%20SK%20Penetapan%20Jumlah%20Surat%20SUARA.pdf>